

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, R.S. 2003. Manajemen Keuangan. Edisi Kelima. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Literata Lintas Media.
- Dharmawati, M. K., & Irmadariyani, R. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–5.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- Halim Abdul, et.al. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
- Iqrayanti, N., Indriyani, N., & Hasti, A. (2018). *ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2016-2018*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta
- Pekei Beni, (2016). Kriteria Rasio Efektifitas & Rasio Keserasian.
- Ningtias, Y. D., Nugroho, T. R., & Ainiyah, N. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*, 1–12.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.
- Ribeiro, M. F., Do, U., Do, V., (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 - 2015.

- Rojestan, Benny, M.N. (2018). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan
- Telecom, P. T. S., & Dewi, M. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan*. 1(1), 1–14.
- Utomo, D. P. (2011). *Analisa Rasio Keuangan Apbd Sebagai Tolak Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009*. 6(2), 57–80.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah